



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI PERIJINAN DAN INSPEKSI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZAINAL ARIFIN
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 240909

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.796.930.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 426.420.000		
2. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 422.400.000		
3. Tanah Seluas 473 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 213.440.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/40 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 134.670.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>154.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. LAINNYA, WIM SEPEDA GUNUNG Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>47.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>437.632.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.435.562.000</b>



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.435.562.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HAENDRA SUBEKTI  
2. Jabatan : DEPUTI  
3. NHK : 804045

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 980.000.000  
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 243.900.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000  
2. MOTOR, DAIHATSU TARUNA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000  
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 70.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 160.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.953.900.000

**III. HUTANG** Rp. 200.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.753.900.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.